



E-ISSN :XXX-XXXX

JURNAL POLITIK GLOBAL

Vol 1 No 1  
2024

## Pembentukan ASEAN *Regional Action Plan for Combating Marine Debris* Tahun 2021

Effa Ellin Sinaga<sup>1</sup>

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia<sup>1</sup>  
effa.ellin3070@student.unri.ac.id

---

### INFO ARTIKEL

Naskah diterima: 30  
September 2024  
Naskah disetujui untuk  
diterbitkan: 4 Oktober 2024  
Diterbitkan: 15 Oktober  
2024  
Volume: 01  
Issue: 01  
DOI:-

---

### KATA KUNCI

ASEAN, Marine Debris, ,  
establishment,

---

### ABSTRACT

*Southeast Asia has been in the global spotlight for marine plastic pollution, with four countries in the region listed among the largest contributors. Each ASEAN member has demonstrated its commitment through national policies on marine debris, which are considered capable of addressing this issue. However, in 2021, ASEAN Plan for Combating Marine Debris at the regional level. This research analyzes using the international cooperation theory of dilemmas of common aversion, which states that countries cooperate due to the lack of clear rules, necessitating coordination. Primary data were obtained through direct interviews with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Secondary data were collected using document analysis techniques sourced from journals, reports, books, and other forms. The results show that the establishment of the Regional Action Plan for Combating Marine Debris in 2021 at the ASEAN regional level is driven by the need for a coordination framework among ASEAN member countries to present uniform standards and avoid the threat of marine plastic debris in the Southeast Asian region.*

---

### Pendahuluan

Sampah plastik di laut menjadi masalah yang memprihatinkan seiring peningkatan produksi plastik global dari tahun 1950 sekitar 1,5 juta metrik ton menjadi 9.200 juta metrik ton pada tahun 2017. Diperkirakan pada tahun 2050 mendatang,<sup>1</sup> angka tersebut akan mencapai 34 miliar metrik ton. *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* menunjukkan data 2021 bahwa setiap tahun sebanyak 14 juta metrik ton plastik berakhir di laut dan plastik diproyeksikan menyumbang 80% dari seluruh sampah di lautan. Pada tahun 2040, perkiraan jumlah limbah plastik yang masuk ke laut menjadi hampir tiga kali lipat yang berarti menambahkan 23 sampai 37 juta metrik ton sampah plastik setiap tahun. Bahkan proyeksi oleh *World Economic Forum* dan *Ellen MacArthur Foundation* dalam laporannya menyebut bahwa pada 2050, plastik di laut diperkirakan akan melebihi banyaknya ikan.<sup>2</sup> Plastik dalam proses degradasinya memerlukan waktu ratusan atau ribuan tahun untuk bisa mengalami

---

<sup>1</sup> UNEP, "From Pollution to Solution a Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution," 2021, <https://www.unep.org/resources/pollution-solution-global-assessment-marine-litter-and-plastic-pollution>.

<sup>2</sup> Ellen MacArthur Foundation, "The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics," 2016, <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics>.

proses penguraian sepenuhnya. Akibatnya, lautan menjadi tempat penumpukan sampah plastik yang semakin mengancam ekosistem laut terutama hewan, kualitas pangan manusia, dan ekonomi pariwisata pesisir.<sup>3</sup>

Polusi plastik telah menimbulkan ancaman terhadap lebih dari 800 spesies hewan laut di seluruh dunia menurut publikasi *Secretariat of the Convention on Biological Diversity (SCBD)*. Pada tahun 2017, Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, yang merupakan konferensi PBB perdana mengenai masalah ini menyebutkan bahwa setiap tahun kondisi sampah laut telah menyebabkan kematian satu juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, dan habitat penyu maupun ikan-ikan.<sup>4</sup> Plastik menjerat dan meracuni satwa laut karena tertelan partikelnya yang berbahaya, termasuk menyebabkan kerusakan pada tumbuhan-tumbuhan laut. Selain itu, sampah plastik menjadi ancaman bagi kesehatan manusia karena dapat masuk ke dalam rantai makanan melalui konsumsi makanan laut yang terkontaminasi sehingga menyebabkan penyebaran penyakit yang bisa bersifat jangka panjang terhadap kualitas hidup.<sup>5</sup> Sementara kerugian ekonomi akibat kebocoran sampah per 10-20 juta metrik ton sampah laut mengakibatkan kerugian sekitar 13 miliar dollar.<sup>6</sup> Biaya yang harus dikeluarkan akibat laut yang tercemar adalah alokasi untuk pembersihan dan pemulihan lingkungan laut serta dampak penurunan pendapatan pariwisata. Pencemaran plastik di lautan merupakan tantangan mendesak yang membahayakan lintas batas regional.

Dari 150 juta metrik ton sampah plastik laut dunia, kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah dengan pertumbuhan produksi sampah tercepat yang bertanggung jawab atas kebocoran sampah plastik di lautan.<sup>7</sup> Sebuah penelitian tahun 2015 oleh Jambeck dan timnya menunjukkan hasil analisis perhitungan dari 192 negara di dunia, lebih dari 50% keseluruhan sampah plastik laut berasal dari China dan empat negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand.<sup>8</sup> Di ASEAN sendiri, total sampah gabungan dari empat *ASEAN Member States (AMS)* tersebut dihitung dengan Malaysia dan Singapura mencapai 243 juta metrik ton.<sup>9</sup> Dari jumlah sampah tersebut, diperkirakan sampah plastik sebesar 31,7 juta metrik ton<sup>10</sup> dengan 4,8 sampai 12,7 metrik ton plastik masuk ke lautan.<sup>11</sup>

Dalam rangka mengatasi permasalahan sampah plastik laut, tindakan internasional menjadi kunci adanya aturan-aturan yang dapat membatasi dan mencegah pembuangan sampah plastik ke lautan. Beberapa konvensi internasional telah diadopsi untuk mengekang sampah laut, yaitu *United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS)*, *London Convention*, *Maritime Pollution*

---

<sup>3</sup> IUCN, "Plastic Pollution," 2021, <https://www.iucn.org/resources/issues-brief/marine-plastic-pollution>.

<sup>4</sup> United Nations, "The UN Ocean Conference 5-9 June, 2017," diakses 23 Februari 2024, <https://www.un.org/en/conf/ocean/>.

<sup>5</sup> United Nations, "New UN Report Finds Marine Debris is Harming More Than 800 Species, Costing Countries Millions," 2016, <https://news.un.org/en/story/2016/12/547032>.

<sup>6</sup> Julie Raynaud, *Valuing Plastic: The Business Case for Measuring, Managing and Disclosing Plastic Use in The Consumer Goods Industry*, 2014, <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/9238>.

<sup>7</sup> World Bank, "Indonesia Marine Debris Hotspot," 2018, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/983771527663689822/pdf/Indonesia-Marine-debris-hotspot-rapid-assessment-synthesis-report.pdf>.

<sup>8</sup> Jenna R. Jambeck dkk., "Plastic Waste Inputs From Land into the Ocean," *Science* 347, no. 6223 (13 Februari 2015): 768–71, doi:10.1126/science.1260352.

<sup>9</sup> Temasek dan AlphaBeta, "Better Together: Business, Government, Society and Our Sustainable Future," 2018, <https://www.ecosperity.sg/en/ideas/better-together-business-government-society-and-our-sustainable-future.html>.

<sup>10</sup> UNEP, "Summary Report: Waste Management in ASEAN Countries," 21 Februari 2017, <https://www.unep.org/resources/report/waste-management-asean-countries-summary-report>.

<sup>11</sup> Jambeck dkk., "Plastic Waste Inputs From Land into the Ocean."

*Prevention (MARPOL) Convention*, dan *Basel Convention*. Dalam konteks aturan dan norma-norma yang mengatur ini, meskipun belum sepenuhnya, prinsip-prinsip konvensi internasional UNCLOS, Konvensi London, Konvensi MARPOL, dan Konvensi Basel pada dasarnya bisa dijadikan panduan sentral bagi AMS. Kehadiran konvensi internasional yang sudah ada sepatutnya bisa menjadi cikal bakal standarisasi bagi kawasan Asia Tenggara mengkonversikan kesepakatan internasional menjadi pengaturan yang lebih serius di tingkat nasionalnya.

Tabel 1.1. di bawah ini menggambarkan tentang komitmen negara-negara anggota ASEAN melalui ratifikasi konvensi internasional yang salah satu isinya mengatur tentang sampah laut.

**Tabel 1.1**  
**Negara-Negara yang Meratifikasi UNCLOS, London Convention,**  
**MARPOL Convention, dan Basel Convention**

NEGARA ANGGOTA ASEAN	RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL			
	UNCLOS	London Convention (1972)	MARPOL Convention (Annex V)	Basel Convention
<b>Brunei Darussalam</b>	1996	-	2016	-
<b>Filipina</b>	1984	1973	2001	1993
<b>Indonesia</b>	1986	-	2012	-
<b>Kamboja</b>	-	-	1995	-
<b>Laos</b>	1998	-	-	-
<b>Malaysia</b>	1996	-	1997	-
<b>Myanmar</b>	1996	-	2016	-
<b>Singapura</b>	1994	-	1999	-
<b>Thailand</b>	2011	-	2023	1997
<b>Vietnam</b>	1994	-	2015	-

*Sumber: Olahan pribadi dari berbagai sumber resmi*

Pada Mei 2021, ASEAN meluncurkan sebuah dokumen *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* yang diklaim merupakan kerangka aksi regional untuk negara-negara anggotanya mengatasi masalah sampah laut di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, negara anggota ASEAN telah aktif dalam penanganan sampah laut melalui pengembangan strategi dan langkah-langkah kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk sampah laut, strategi pengelolaan sampah plastik nasional, dan strategi ekonomi sirkular yang merupakan istilah upaya pemodelan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi limbah. Namun, masih ada kesenjangan di antara AMS antara langkah-langkah yang ada dan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif. Berikut aturan-aturan nasional terkait sampah laut yang diterapkan oleh AMS:

- 1) Brunei Darussalam. Brunei Darussalam telah memberlakukan Undang-Undang Pelanggaran Ringan dan Perintah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2016 (*Minor Offences Act and the Environmental Protection and Management Order*) dan sedang dalam proses mengembangkan Peraturan Pengelolaan Limbah (*Waste Management Regulation*) pertama untuk pengelolaan limbah padat tidak berbahaya di tingkat nasionalnya. Selain itu, pemerintah

Brunei telah memberlakukan kenaikan cukai sebesar 3 persen untuk impor produk plastik yang berlaku sejak April 2017.<sup>12</sup>

- 2) Filipina. Di Filipina, terdapat Undang-Undang Solid Waste Management (SWM) seperti Undang-Undang Republic Act 9003 (*Major SWM legislation includes the Republic Act 9003*) yang mengamankan layanan pengumpulan sampah universal dan pemisahan sumber sampah, RUU Senat No. 2759 Undang-Undang Larangan Kantong Plastik Total 2011 (*Total Plastic Bag Ban Act of 2011*), RUU Senat No. 1948 Undang-Undang Peraturan dan Manajemen Plastik Sekali Pakai 2018 (*Single-use Plastics Regulation and Management Act of 2018*), dan RUU DPR No. 4922 Undang-Undang Pembuangan Wadah Minuman (*Beverage Container Disposal Act*). Pemerintah diperkirakan akan segera mengeluarkan Rencana Aksi Nasional tentang Plastik dan Sampah Laut (*National Plan of Action on Plastics and Marine Litter*).
- 3) Indonesia. Indonesia memiliki Rencana Aksi Nasional Sampah Plastik Laut (2017-2025) yang berfokus pada lima pilar, yaitu meningkatkan kesadaran perilaku para pemangku kepentingan; pengelolaan sampah yang bersumber dari darat; meningkatkan mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum; serta penelitian dan pengembangan.<sup>13</sup> Di samping itu, Indonesia merilis peta jalan implementasi Extended Producer Responsibility (EPR).<sup>14</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mengembangkan peta jalan ekonomi sirkular nasional, dengan fokus pada kemasan plastik.<sup>15</sup>
- 4) Kamboja. Kamboja telah mengembangkan Strategi dan Rencana Aksi Sampah Nasional 2018-2030 (*National Waste Strategy and Action Plan*) yang berfokus pada pemilahan sampah plastik dan pengelolaan kantong plastik. Kamboja memiliki Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Phnom Penh 2018-2035 (*Phnom Penh Waste Management Strategy and Action Plan*) berfokus pada isu-isu pengelolaan sampah plastik seperti tindakan yang mendukung pengembangan pendaur ulang plastik.<sup>16</sup>
- 5) Laos. Negara ini memiliki peraturan perlindungan lingkungan seperti Undang-Undang Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection Law/EPL*) No. 29/NA dan Strategi Pertumbuhan Hijau (*Green Growth Strategy*) yang memberikan kerangka hukum dasar untuk Solid Waste Management (SWM). Laos berencana untuk mengembangkan rencana induk untuk SWM dan pemerintah sedang mempertimbangkan peraturan tentang kantong belanja plastik sekali pakai.<sup>17</sup>
- 6) Malaysia. Malaysia memiliki Peta Jalan Menuju Nol Plastik Sekali Pakai (*Roadmap towards Zero Single-Use Plastics*) yang berfokus pada pengurangan plastik sekali pakai dan mencari alternatif pengganti plastik. Area fokusnya meliputi pengembangan kriteria pelabelan ramah lingkungan untuk bahan kemasan plastik yang dapat terurai secara hayati dan dapat dibuat kompos serta produk berbasis biomassa. Negara ini sedang mengembangkan peta jalan Ekonomi Melingkar (*Circular Economy*) untuk botol dan plastik sekali pakai lainnya, dengan fokus pada skema EPR.
- 7) Myanmar. Myanmar memiliki Strategi dan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Nasional 2018-2030 (*The National Waste Management Strategy and Master Plan*), yang mencakup

---

<sup>12</sup> OECD, "Extended Producer Responsibility" (OECD, 20 September 2016), doi:10.1787/9789264256385-en.

<sup>13</sup> Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Indonesia's Plan of Action on Marine Plastic Debris 2017-2025," 2018,

[/https://maritim.go.id/konten/unggahan/2018/03/NAP\\_Marine\\_Plastic\\_Debris\\_Indonesia\\_Summary.pdf](https://maritim.go.id/konten/unggahan/2018/03/NAP_Marine_Plastic_Debris_Indonesia_Summary.pdf).

<sup>14</sup> United Nations, "From Waste Reduction Toward Circular Economy Implementation in Indonesia," 2018, [https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-](https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-10/Laksmi%20Dhewanthi%20%28Indonesia%29%20CE%20in%20Indonesia_Laksmi_02102018.pdf)

[10/Laksmi%20Dhewanthi%20%28Indonesia%29%20CE%20in%20Indonesia\\_Laksmi\\_02102018.pdf](https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-10/Laksmi%20Dhewanthi%20%28Indonesia%29%20CE%20in%20Indonesia_Laksmi_02102018.pdf).

<sup>15</sup> UNDP Indonesia, "UNDP, Bappenas and Denmark Collaborate to Support the Development of Circular Economy in Indonesia," 3 Maret 2020, <https://www.undp.org/indonesia/press-releases/undp-bappenas-and-denmark-collaborate-support-development-circular-economy-indonesia>.

<sup>16</sup> UNEP, "Phnom Penh Waste Management Strategy and Action Plan 2018-2035," 2018, <https://www.unep.org/ietc/resources/policy-and-strategy/phnom-penh-waste-management-strategy-and-action-plan-2018-2035>.

<sup>17</sup> European Union and ASEAN, "Circular Economy and Plastics: A Gap Analysis in ASEAN Member States" (Mission of the European Union to ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, 2019), <https://www.iges.or.jp/en/pub/ce-plastics/en>.

sampah plastik, akan segera diluncurkan. Kebijakan ini memiliki enam tujuan mulai dari memperluas layanan pengumpulan sampah yang baik untuk semua warga negara hingga memastikan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan.<sup>18</sup> Sebagai contoh, negara ini bertujuan untuk mencapai 100 persen layanan pengumpulan sampah, termasuk sampah plastik, untuk semua warga negara pada tahun 2030.

- 8) Singapura. Negara ini meluncurkan Rencana Induk Nol Sampah (*Zero Waste Masterplan*) pada tahun 2019, dengan fokus pada bidang-bidang seperti mengembangkan kemampuan daur ulang lokal, menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi tiga aliran limbah prioritas yaitu mengurangi limbah elektronik, limbah makanan, dan limbah kemasan, termasuk plastik, sehingga dapat memperpanjang masa pakai tempat pembuangan sampah satu-satunya di Singapura, serta meningkatkan pesan tentang daur ulang. Kebijakan lain berfokus pada pengenalan kerangka kerja pelaporan kemasan wajib pada tahun 2021 dan skema EPR untuk pengelolaan sampah kemasan, termasuk plastik, yang akan diterapkan secara bertahap selambat-lambatnya pada tahun 2025, dimulai dengan Skema Pengembalian Uang Jaminan untuk wadah minuman. Sebuah kelompok kerja warga telah dibentuk pada tahun 2020 untuk bersama-sama menciptakan solusi dengan anggota masyarakat untuk mengurangi konsumsi barang sekali pakai yang berlebihan.
- 9) Thailand. Pada tahun 2019, pemerintah Thailand telah mengumumkan Peta Jalan Thailand tentang Pengelolaan Sampah Plastik 2018-2030 (*Thailand Roadmap on Plastic Waste Management*), yang berfokus pada penghapusan jenis plastik tertentu seperti segel tutup plastik dan kantong plastik dengan ketebalan kurang dari 36 mikron, dan insentif untuk menggunakan alternatif seperti plastik yang dapat terurai secara hayati.
- 10) Vietnam. Vietnam telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk Pengelolaan Sampah Plastik Laut (*National Action Plan for Management of Marine Plastic Litter by 2030*) pada tahun 2020. Rencana tersebut menekankan pada perubahan perilaku, pengumpulan dan klasifikasi sampah plastik, pengendalian sampah plastik pada sumbernya, kerja sama internasional, dan tinjauan yang konsisten terhadap pengelolaan sampah plastik laut.

Aturan AMS dengan keketatan strategi masing-masing menunjukkan bahwa negara ASEAN sebenarnya telah lebih dulu berinisiatif memiliki komitmen menghadapi permasalahan sampah plastik laut di tingkat nasional sebelum rencana aksi regional ASEAN (RAP ASEAN) dibentuk. Namun, pada tahun 2021, negara-negara Kawasan Asia Tenggara justru menerbitkan *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* di tingkat ASEAN. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui apa alasan yang melatarbelakangi ASEAN membentuk *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris*.

### **Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian terdahulu, sudah dibahas tentang sebuah pembentukan kebijakan regional ASEAN tentang permasalahan lingkungan oleh literatur lain, tetapi berfokus pada fenomena asap yang disebut kebijakan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* menggunakan konsep *human security*. Penelitian yang lain membahas tentang Implementasi *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris* untuk melihat target pembangunan berkelanjutan atau SDGs, berbeda dengan objek yang peneliti bahas. Pada tulisan ini, peneliti menganalisis tentang *pembentukan ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* Tahun 2021, yaitu sebuah pembentukan dokumen kebijakan yang belum pernah dibahas sebelumnya dan merupakan urgensi yang penting untuk diangkat karena secara khusus meneliti isu sampah plastik laut di Asia Tenggara sehingga lebih aktual dan dikaji secara mendalam.

### **Metodologi**

---

<sup>18</sup> United Nations, "Overview on the 3R Practices at Waste Management in Myanmar," 2019, [https://uncrd.un.org/sites/uncrd.un.org/files/8th-3r\\_cbg-2\\_myanmar.pdf](https://uncrd.un.org/sites/uncrd.un.org/files/8th-3r_cbg-2_myanmar.pdf).

Peneliti menggunakan pengumpulan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pengumpulan data melalui interpretasi terhadap temuan dengan memperluas analisis data, menguraikan informasi, dan memvalidasinya. Metode penelitian kualitatif ini bersifat eksplanasi yang menjelaskan alasan pembentukan *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dokumen dalam mengkaji pembentukan *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris*. Analisis dokumen merupakan prosedur sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen-dokumen, baik yang dicetak maupun yang berbasis elektronik seperti buku, jurnal, laporan-laporan, surat kabar, dan sumber bacaan lainnya.<sup>19</sup> Analisis dokumen mencakup tiga tahap, yaitu membaca sekilas atau *skimming*, membaca dengan seksama, dan interpretasi. Selain itu, peneliti melakukan wawancara kepada Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN (KSBA) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang terlibat mendorong disepakatinya *RAP (Regional Action Plan) for Combating Marine Debris* pada tahun 2021, dan mengumpulkan sumber-sumber relevan dengan penelitian yang dibahas untuk mendapatkan keseluruhan data yang kredibel terkait dengan pembentukan *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* tahun 2021. Peneliti menganalisis menggunakan teori kerja sama internasional yang disebabkan karena negara anggota ASEAN mengalami *dilemmas of common aversions*. Dalam hal kerja sama dalam pembentukan rencana aksi regional ASEAN ini, mekanisme pengambilan keputusannya dilakukan dengan cara melakukan koordinasi di antara negara-negara anggota ASEAN.

### **Analisis**

*ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* tahun 2021 dibentuk sebagai respon terhadap permasalahan serius yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN terkait sampah laut. Pembentukan rencana aksi yang berisi 14 aksi regional ini dipengaruhi oleh beberapa dilema utama yang dialami oleh ASEAN. Dalam analisis ini, peneliti akan menggunakan teori *dilemmas of common aversion* untuk memahami mengapa dilema ini membutuhkan koordinasi melalui kerjasama regional.

#### **a. Dilema Kesenjangan Pengelolaan Sampah Plastik di Seluruh Negara Anggota ASEAN**

Pembentukan *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* mencerminkan kesadaran kolektif atas dilema-dilema yang ingin dihindari negara-negara di Kawasan Asia Tenggara terhadap ancaman ekosistem laut, hewan, dan manusia. Dalam dilema ini, negara-negara kawasan ASEAN memiliki intensif kuat untuk bekerja sama agar terhindar dari situasi yang memperparah pencemaran laut akibat sampah plastik yang tidak dikelola secara efektif. Negara-negara ASEAN memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengendalikan masalah sampah laut sehingga dengan membentuk rencana aksi regional ini negara-negara ASEAN menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan mereka untuk berbagi sumber daya, teknologi, dan pengetahuan bersama dalam mengatasi masalah sampah laut. Dengan kata lain, *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* adalah respons terhadap dilema yang dihadapi negara-negara ASEAN terkait polusi laut.

Peneliti mengidentifikasi bahwa terdapat empat jenis kesenjangan yang menjadi dilema di seluruh negara anggota ASEAN. Dilema kesenjangan ini menjelaskan situasi ASEAN tanpa adanya koordinasi di tingkat regional. Keempat kesenjangan tersebut, yaitu informasi dan pengetahuan bersama, regulasi dan kebijakan tata kelola, kapasitas teknis, serta pasar dan keuangan. Keempat kesenjangan tersebut diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (3 Agustus 2009): 27–40, doi:10.3316/QRJ0902027.

## 1. Informasi dan Pengetahuan Bersama

Informasi dan pengetahuan yang berkualitas merupakan elemen penting untuk merancang tindakan yang efektif. Tanpa adanya informasi data berkualitas dan pengetahuan yang relevan tentang pengaturan plastik, negara dapat membuat asumsi dan mengambil keputusan tentang plastik yang tidak efektif atau mengalami konsekuensi yang tidak diinginkan mengatasi masalah sampah laut.

“...ASEAN 10 ini kan enggak semuanya memiliki kapasitas ataupun resources yang sama. Terutama kalau kita lihat negara-negara dari paling tidak LMC yaitu Laos Myanmar dan Kamboja. Kamboja itu adalah anggota dari LDCs atau least developed country artinya mereka memiliki kapasitas yang sangat jauh daripada Indonesia, Malaysia, Thailand, atau *pun* Filipina. Kalau kita bandingkan lagi dengan Singapura ini sudah bisa dikatakan sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang cukup maju *gitu*. Jadi memang gap atau kesenjangannya cukup besar tetapi bagaimana artinya ASEAN bisa bersama-sama setting the pace yang bisa diikuti seirama dengan 10 anggota ASEAN lainnya. Jadi mengenai pengetahuan dan informasi itu belum tentu sama, apalagi kalau kita *ngomongin* marine debris kita lihat bahwa Laos itu kan land locked country *ya* (daratan yang terkurung/tidak ada laut sendiri) yang isunya juga berbeda *gitu loh...*”<sup>20</sup>

Contoh kesenjangan dalam informasi dan pengetahuan terkait masalah plastik di seluruh negara anggota ASEAN:

- a) Data tentang pola dan tren penggunaan plastik, serta rute penanganan dan daur ulang sampah juga sistem untuk membuat informasi dapat diakses secara luas.<sup>21</sup> Brunei Darussalam menghadapi kendala data yang signifikan terkait pengelolaan dan daur ulang sampah. Di Kamboja, data mengenai timbunan sampah plastik dan volume daur ulang, jumlah pendaur ulang, dan operasi daur ulang yang ada di Kamboja masih terbatas.<sup>22</sup> Terlebih lagi di negara ini, sumber data sampah yang ada sering kali tidak konsisten dan tidak dapat diverifikasi.<sup>23</sup> Oleh karena itu, data mengenai sampah plastik harus disistematisasikan dengan lebih baik dan dibuat lebih mudah diakses untuk tujuan pemantauan dan pelaporan, termasuk meningkatkan pengukuran sampah plastik di tempat pembuangan akhir. Sementara dibandingkan dengan negara lain terutama Singapura, negara ini lebih unggul karena sistem pengelolaan data sampahnya tersedia dan lebih efektif. Partisipasi yang aktif dari sektor swasta, dan semakin banyaknya inisiatif terkait sampah plastik memberikan peluang besar Singapura menuju ekonomi yang lebih melingkar dan patut memimpin promosi kerja sama lintas regional.
- b) Kejelasan tentang masalah yang terkait dengan berbagai jenis plastik serta manfaatnya. Malaysia menghadapi masalah dalam menetapkan sistem pemilahan sumber limbah padat perkotaan. Karena buruknya pemilahan, sebagian besar sampah plastik domestiknya saat ini terkubur di tempat pembuangan sampah. Oleh karena itu, negara ini dihadapkan pada sebuah tantangan yang unik meskipun memiliki industri daur ulang plastik yang besar, dengan tingkat keahlian yang tinggi, Malaysia terutama mengolah limbah impor, tetapi peningkatan volume plastik pasca-konsumen dalam negeri terus menghambat sistem pengelolaan limbah yang ada di negara tersebut.
- c) Pengetahuan tentang besarnya berbagai masalah yang terkait dengan siklus hidup plastik, misalnya dampak sosial ekonomi dan konsekuensinya terhadap berbagai kelompok dalam masyarakat. Hal ini termasuk manfaat relatif dari berbagai opsi daur ulang, termasuk peran daur ulang dalam ekonomi sirkular.
- d) Kesadaran akan isu-isu yang terkait dengan bahan kimia berbahaya dan zat-zat yang menjadi perhatian yang ditemukan dalam plastik.

---

<sup>20</sup> Direktorat KSBA Kemlu RI, “Analisis Pembentukan ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris Tahun 2021,” wawancara oleh Effa Ellin Sinaga, Zoom Meeting, 6 Juni 2024.

<sup>21</sup> European Union and ASEAN Secretariat, “Circular Economy and Plastics: A Gap Analysis in ASEAN Member States” (Mission of the European Union to ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, 2019), <https://www.iges.or.jp/en/pub/ce-plastics/en>.

<sup>22</sup> Rajeev Kumar Singh dkk., “State of Waste Management in Phnom Penh, Cambodia,” 10 Juli 2018, <https://www.unep.org/ietc/resources/report/state-waste-management-phnom-penh-cambodia>.

<sup>23</sup> Ibid.

Banyak negara ASEAN dan di seluruh dunia memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai manfaat dan tahapan siklus plastik. Plastik sering kali dibingkai sebagai masalah sampah tanpa analisis yang tepat mengenai aspek perdagangan, interaksi sektoral, desain, manufaktur, dan pola penggunaan. Konsumen dan pemerintah dapat membuat kesimpulan yang terlalu dini mengenai pelarangan plastik tanpa mempertimbangkan alternatif atau efek sampingnya. Oleh karena itu, dilema ini perlu diatasi untuk menghindari meluasnya masalah sampah plastik yang akhirnya berdampak ke lingkungan laut.

## 2. Regulasi dan Kebijakan Tata Kelola

Tata kelola terkait plastik perlu lebih sistematis di antara negara-negara ASEAN. Pemerintah nasional harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog antara semua pemangku kepentingan, menawarkan atau mendukung pengembangan alat praktis, dan memfasilitasi pergeseran masalah yang terkait dengan plastik di masyarakat dan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan memastikan segala urusan yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pemangku kepentingan yang terkena dampak dan mengubah praktik bisnis mereka untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, sistem tata kelola yang efektif untuk masalah plastik harus adaptif terhadap perubahan situasi dan mampu mengidentifikasi bahan dan produk yang paling bermasalah sementara pada saat yang sama perlu mendorong inovasi teknis dan sosial menuju solusi masalah sampah plastik laut yang lebih baik.

Contoh kesenjangan dalam kebijakan dan tata kelola terkait masalah plastik di seluruh negara anggota ASEAN:<sup>24</sup>

- a) Kejelasan mengenai mandat, peran, dan tanggung jawab di berbagai tingkat dan lembaga pemerintahan. Di Kamboja, pemerintah kabupaten dan kota masih belum jelas mengenai peran dan tanggung jawab dalam menerapkan undang-undang tentang pengelolaan sampah. Sebagian besar tantangan ini terletak pada kenyataan bahwa banyak kementerian mempunyai tanggung jawab yang tumpang tindih dalam pengelolaan sampah plastik. Selain itu, di Laos misalnya, fragmentasi kelembagaan dan ketidakjelasan mandat serta pembagian peran sangat penting diperbaiki terkhusus memperjelas peran dan tanggung jawab terkait pengurangan penggunaan plastik, pemisahan sumber, dan perluasan serta peningkatan daur ulang plastik. Demikian pula Indonesia, yang mengakui urgensi masalah plastik menunjukkan agenda utamanya dengan memprioritaskan kebijakan dalam memperbaiki pengelolaan sampah yang sudah ada dapat dikatakan satu langkah lebih maju, meskipun pengurangan fragmentasi kelembagaan perlu dikurangi dan penetapan tanggung jawab kelembagaan yang lebih jelas di kalangan pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan.
- b) Kerangka kerja yang komprehensif dengan paket kebijakan dan instrumen untuk mengubah strategi dan rencana nasional menjadi tindakan di lapangan. Di Filipina, Undang-Undang Pengelolaan Limbah Padat Ekologis (Republic Act 9003) telah sering dilihat sebagai model undang-undang oleh negara-negara lain. Sementara, Myanmar yang telah mengakui urgensi untuk mengambil tindakan atas masalah plastik, undang-undang dan kebijakan formal tentang plastiknya belum berkembang dengan baik. Peraturan yang ada tentang pengelolaan sampah juga hanya diterapkan sebagian. Untuk mengatasi situasi ini, disarankan berkoordinasi dengan negara lain yang akan bermanfaat meningkatkan komitmen kebijakan di Myanmar. Apalagi jika dibandingkan dengan Thailand, meskipun kapasitas pengelolaan limbah yang terbatas di negara Thailand, tetapi hal ini telah menyebabkan fokus yang lebih besar pada komitmen sukarela untuk menangani produk plastik sekali pakai, industri pariwisata Thailand termasuk hotel, bar, dan restoran di kota-kota besar seperti Bangkok yang memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap plastik sekali pakai. Thailand sendiri sangat responsif terhadap tekanan internasional dan tren kebijakan regional, salah satu perkembangan yang menjanjikan adalah bahwa negara ini mengambil

---

<sup>24</sup> European Union and ASEAN, "Circular Economy and Plastics: A Gap Analysis in ASEAN Member States."

peran utama dalam merangkul negara-negara Kawasan Asia Tenggara memerangi polusi plastik di laut ASEAN.

- c) Pendekatan yang efektif bagi pemerintah untuk terlibat dan berkoordinasi dengan beragam pemangku kepentingan. Di Kamboja, bantuan internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan proyek daur ulang plastik. Pendanaan tentang mengubah prosedur kontrak yang terkait dengan kemitraan publik-swasta saat ini berjalan lambat dan tidak praktis di Kamboja. Salah satu titik masuk potensial untuk mengoordinasikan tindakan terhadap sampah plastik adalah Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan (NCSD) Kamboja.
- d) Alat dan panduan untuk mendukung tindakan para pemangku kepentingan terkait.

Tata kelola plastik di ASEAN sering kali dibingkai sebagai masalah yang mengarah pada strategi pengelolaan sampah nasional seperti pembuangan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), pemilahan sumber, daur ulang, dan beberapa pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Namun, rencana-rencana ini belum diimplementasikan sebagaimana mestinya karena mandat dan mekanisme koordinasi yang tidak jelas. Tata kelola yang efektif membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang kuat di antara berbagai pemangku kepentingan.

### 3. Kapasitas Teknis

Mengatasi masalah plastik membutuhkan pengetahuan teknis di berbagai bidang, akses ke peralatan teknis yang efektif, serta kapasitas untuk penelitian dan inovasi.

“...Untuk kapasitas teknis artinya tidak semua negara anggota ASEAN memiliki kapasitas ataupun pengetahuan yang sama untuk mengelola limbah plastik dan juga akses terhadap peralatan dan juga bagaimana mengoperasionalkan teknologinya dan bagaimana mengembangkan riset dan teknologi untuk penanganan marine debris ini...”<sup>25</sup>

Contoh kesenjangan dalam kapasitas teknis terkait masalah plastik di seluruh negara anggota ASEAN:

- a) Pelatihan teknis yang terbatas. Misalnya, pemerintah Indonesia menyadari masalah plastik dan telah menunjukkan kesediaannya untuk mengatasi masalah ini dengan menunjukkan kepemimpinan politik dan komitmen untuk menetapkan dan mencapai target sampah plastik laut yang ambisius. Namun demikian, masih terdapat kekurangan keterampilan dan keahlian di antara badan-badan pemerintah pusat dan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius bagi pemerintah daerah karena tidak cukupnya dukungan yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
- b) Kendala teknologi dan sumber daya manusia yang terkait dengan pengelolaan plastik pasca-penggunaan, seperti kurangnya infrastruktur untuk mencegah kebocoran plastik ke lingkungan. Misalnya di Vietnam, saat ini pengelolaan sampah termasuk jenis sampah plastik telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan mengenai pengelolaan sampah tidak berbahaya dan sampah berbahaya sesuai dengan undang-undang perlindungan lingkungan yang ada. Namun, sampah plastik di Vietnam menyumbang sejumlah besar dari total jumlah sampah yang dihasilkan, tidak ditangani dan dikelola dengan baik, karena tidak ada peraturan khusus untuk mengelola jenis sampah ini. Selain itu, teknologi daur ulang sampah padat, termasuk sampah plastik, belum sepenuhnya dievaluasi untuk memberikan panduan dalam pemilihan teknologi daur ulang yang sesuai dengan karakteristik sampah lokal. Rute daur ulang sering kali diatur melalui rute informal/toko rongsokan dan pemungutan sampah, ke fasilitas pemulihan material skala kecil di desa-desa kerajinan. Plastik berkualitas rendah semakin tidak menarik untuk kegiatan pemulihan material berbasis pasar. Bahkan di Da Nang, kota terbesar ketiga di Vietnam, plastik, terutama botol PET, dikumpulkan oleh toko-toko barang bekas dan dipadatkan serta dikirim ke kota-kota

---

<sup>25</sup> Direktorat KSBA Kemlu RI, “Analisis Pembentukan ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris Tahun 2021,” wawancara oleh Effa Ellin Sinaga, Zoom Meeting, 6 Juni 2024.

besar untuk pemulihan material lebih lanjut. Hal ini menggambarkan kurangnya pengolahan serta kapasitas daur ulang material di negara tersebut selain di daerah sekitar Ha Noi dan Ho Chi Minh. Bahkan di Ha Noi dan Ho Chi Minh, di mana fasilitas semacam itu ada, mereka biasanya memiliki kapasitas kecil dan daur ulang didominasi metode yang tidak efektif dan tidak efisien. Standar nasional dan peraturan teknis nasional Vietnam untuk bahan baku dan produk daur ulang belum dikembangkan dan diterbitkan.

- c) Rendahnya kapasitas inovasi, terutama di kalangan UKM. Contohnya Malaysia yang perlu meningkatkan kesadaran dan penguatan kapasitas produsen plastik dan kemasan, terutama UKM.
- d) Beberapa inisiatif untuk mendorong inovasi, termasuk inovasi sosial untuk mengurangi penggunaan plastik serta inovasi teknis tentang alternatif yang berkelanjutan.

Dilema AMS tentang kesenjangan kapasitas teknis yang tidak memadai ini misalnya dalam hal daur ulang yang berkualitas, pemilahan sampah, dan pengolahan sampah plastik.<sup>26</sup> Selain itu, terdapat kurangnya kapasitas penyerapan untuk menyesuaikan teknologi dengan konteks lokal yang sering kali disebabkan oleh teknologi impor yang mahal dan rumit serta ketergantungan pada keahlian asing.

#### 4. Pasar dan Keuangan

“...Terakhir mungkin yang juga tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari finansial pasar. Artinya investasi itu memang sangat dibutuhkan untuk mendukung kolektif goals kita untuk mencapai lingkungan yang sustainable, lingkungan yang terbebas dari sampah plastik dan juga lingkungan yang sehat dari limbah-limbah yang berbahaya...”<sup>27</sup>

Pasar dan keuangan memainkan peran utama dalam membentuk aliran plastik di seluruh rantai nilai. Namun, pemahaman yang jelas tentang hubungan antara mekanisme pasar dan plastik belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam respon nasional di seluruh kawasan. Contoh kesenjangan dalam pasar dan keuangan terkait masalah plastik di seluruh negara anggota ASEAN:

- a) Rendahnya akses terhadap pembiayaan untuk solusi ramah lingkungan, termasuk penelitian dan pengembangan alternatif pengganti plastik dan pemrosesan pasca-penggunaan yang efisien.<sup>28</sup> Misalnya di Brunei Darussalam, fasilitas pemilahan, pengumpulan, dan daur ulang sampah perlu ditingkatkan secara besar-besaran untuk mengatasi kekurangan yang ada dalam penyediaan layanan, hal ini akan membutuhkan penentuan apakah sistem pengelolaan sampah yang ada harus terus dibiayai oleh pemerintah atau diprivatisasi sepenuhnya, yang akan membantu mendorong konsensus yang lebih baik tentang cara-cara untuk mengatasi sampah plastik secara lebih efektif. Namun, sistem *management municipal solid waste* (pengelolaan sampah perkotaan) tidak beroperasi dengan baik karena kurangnya dukungan finansial, terutama dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selain itu, rendahnya kapasitas dan pengetahuan tentang teknologi dan infrastruktur pengolahan yang tepat serta penyalahgunaan sumber daya yang ada masih menjadi kendala utama.
- b) Kurangnya standar bersama untuk produk daur ulang dalam memastikan kontrol kualitas dan membawa kepercayaan ke pasar.
- c) Akses yang buruk ke pasar untuk barang daur ulang. Sulit bagi penjual dan pembeli potensial untuk menemukan satu sama lain dan untuk menyetujui persyaratan bisnis.
- d) Pasokan plastik yang dapat didaur ulang tidak stabil, menciptakan ketidakpastian bagi calon pembeli.
- e) Hambatan masuk yang tinggi untuk bisnis yang bertanggung jawab, persaingan tidak sehat oleh perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan dan bertindak tidak etis.
- f) Ketidakpastian pasar yang tinggi, menghambat investasi.
- g) Kurangnya transparansi dan kekurangan dalam hal akuntabilitas secara keseluruhan.

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> European Union and ASEAN, “Circular Economy and Plastics: A Gap Analysis in ASEAN Member States.”

Bukti dari dilema ini dapat dilihat dari kesenjangan ASEAN dalam rute dan infrastruktur pasar yang buruk berkontribusi pada pasar yang tidak teregulasi, salah urus, polusi, dan dampak kesehatan. Terbatasnya informasi mengenai pembeli, penjual, dan harga daur ulang, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas, menghambat persaingan untuk mendapatkan alternatif yang berkelanjutan. Akses terhadap pinjaman untuk solusi berkelanjutan sulit diperoleh karena suku bunga yang tinggi dan kurangnya kolaborasi dalam peraturan perdagangan, yang mengarah pada praktik-praktik yang tidak berkelanjutan.

## **b. Ketiadaan Standar yang Sama di ASEAN Mengatasi Masalah Sampah Plastik Laut Perlu Dikoordinasikan**

Inisiatif *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* lahir dari kesadaran bahwa sampah laut merupakan masalah lintas batas dan ASEAN sendiri telah berkontribusi menyumbang sampah plastik di lautan dunia, sehingga upaya untuk menyelesaikannya memerlukan kerja sama regional yang kuat dan terkoordinasi. Melalui koordinasi regional, negara-negara ASEAN dapat berbagi sumber daya dan pengetahuan yang dapat menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan jika setiap negara harus berjuang sendiri dengan sumber daya yang terbatas. Adanya koordinasi strategis yang menyeluruh ini akan membantu setiap negara di ASEAN menghadapi tantangan yang berbeda dalam mengatasi masalah sampah laut, baik dari segi kemampuan sumber daya, kapasitas, maupun prioritas nasionalnya.

“...Kami sampaikan di awal dulu bahwa ini kita bawa di ASEAN karena kita melihat tidak hanya isu masing-masing negara ASEAN saja, tetapi menjadi isu regional yang perlu dikerjasamakan dalam kerangka ASEAN. Artinya di ASEAN ada beberapa negara yang istilahnya menjadi kontributor ya cukup besar antara lain Indonesia, Thailand, dan juga Vietnam. Kita lihat bahwa dari situasi yang cukup memperhatikan ini ASEAN sadar bahwa kita perlu melakukan sesuatu, *gitu*...Jadi karena ada yang kesadaran yang besar di antara negara ASEAN untuk penanganan masalah marine debris, jadi *memang* disusun Regional Action Plan ini...Sehingga justru perlu ada koordinasi regional, artinya *kan* kita enggak bisa berjalan sendiri *gitu*, kita punya objektif atau *pun* visi yang besar untuk penanganan masalah marine debris. Kita berangkat dari regional atau *pun* istilahnya tetangga terdekat kita *lah*. Kita ajak untuk bekerja sama, kita susun bagaimana kita bisa menciptakan suatu environment atau *pun* ekosistem laut yang berkelanjutan yang sehat dan berkesinambungan...”<sup>29</sup>

Peneliti mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan nasional tentang masalah sampah plastik laut yang telah ada sebelum pembentukan *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* di masing-masing negara ASEAN juga mendorong koordinasi di antara negara-negara ASEAN sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan norma-norma di Kawasan ASEAN. Dengan begitu, **keputusan kebijakan ke depan atau yang sedang berjalan di satu negara tidak mengganggu negara anggota ASEAN yang lainnya, maka keputusan bersama di regional ASEAN merupakan jalan terbaik untuk menghindari pengambilan keputusan secara mandiri yang memungkinkan memperparah risiko tentang masalah sampah laut.** Rencana aksi regional akan menciptakan kerja yang dapat digunakan untuk menetapkan standar, prinsip, dan prosedur yang disepakati bersama. Ini memastikan adanya pendekatan yang seragam dan terpadu dalam menangani masalah sampah laut di seluruh wilayah ASEAN.

### **1. Koordinasi Kebijakan Regional**

#### **Koordinasi tentang Kesepakatan Internasional ASEAN Mengatasi Sampah Laut**

---

<sup>29</sup> Direktorat KSBA Kemlu RI, “Analisis Pembentukan ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris Tahun 2021,” wawancara oleh Effa Ellin Sinaga, Zoom Meeting, 6 Juni 2024.

Produk plastik lazim ditemukan dalam kegiatan penangkapan ikan, tetapi di negara-negara ASEAN terdapat tingkat transposisi dan implementasi yang rendah dari prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam konvensi internasional untuk mengatur kegiatan penangkapan ikan dan operasi pengelolaan limbahnya. Semua AMS telah meratifikasi MARPOL Annex V kecuali Laos dan Thailand, dalam hal ini harus dipastikan penyediaan fasilitas penerimaan yang memadai untuk limbah kapal di pelabuhan termasuk alat tangkap yang sudah habis masa pakainya.<sup>30</sup> Namun, di beberapa AMS, pengelolaan limbah belum sepenuhnya diterapkan di pelabuhan dan di atas kapal dan tidak ada peraturan khusus mengenai peralatan pencegahan polusi kapal di atas kapal. Beberapa AMS telah menerapkan sistem perizinan dan registrasi untuk mengendalikan kegiatan penangkapan ikan, pembuangan limbah padat atau sampah apa pun termasuk alat tangkap ke area perairan sangat dilarang, tetapi saat ini tidak ada kewajiban hukum di semua AMS bagi kapal untuk membawa peralatan pengambilan alat tangkap, mengambil alat tangkap yang hilang, atau melaporkan kehilangan dan atau pengambilan alat tangkap. Pembersihan sampah laut yang ditargetkan saat ini terbatas pada inisiatif sukarela. Ada kebutuhan untuk koordinasi lebih lanjut dalam upaya regional untuk implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip MARPOL dan konvensi lain untuk plastik yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan serta teknologi inovatif untuk mengatasi sampah plastik laut dari sumbernya.

### **Koordinasi tentang Perdagangan Sampah Plastik**

Koordinasi penting lain adalah tentang tantangan perdagangan sampah plastik di ASEAN. Meningkatnya arus masuk sampah plastik dari luar negeri telah memperburuk tantangan domestik. China sebelumnya mengimpor lebih dari 7 juta ton sampah plastik setiap tahunnya,<sup>31</sup> tetapi sejak melarang perdagangan ini pada awal tahun 2018, negara-negara di Asia Tenggara tiba-tiba menjadi tujuan ekspor utama untuk bahan-bahan ini.<sup>32</sup> Hal ini diatur dalam penerapan kebijakan “Pedang Nasional” (*National Sword*), yang menetapkan ambang batas untuk impor sampah. Namun, jika mekanisme untuk memastikan tingkat kualitas yang sesuai tersedia, sampah plastik impor dapat menjadi penting untuk menyediakan tingkat bahan baku yang cukup untuk menciptakan proyek investasi yang layak untuk daur ulang, yang selama ini menjadi penghalang utama bagi pengembangan dari banyak proyek daur ulang di ASEAN.<sup>33</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi internasional telah merevisi standar perdagangan dan perjanjian lingkungan multilateral untuk memperhitungkan perdagangan limbah yang terus meningkat, termasuk amandemen Konvensi Basel. Sejak pembatasan impor sampah oleh Tiongkok, banyak negara di Asia yang mengikutinya, termasuk di beberapa AMS. Sebagai contoh, Vietnam membatasi impor *scrap* plastik dengan memperkuat standar pemeriksaan,<sup>34</sup> yaitu hanya *scrap* plastik “bersih” dengan pengotor kurang dari 2 persen yang dapat diimpor dan membatasi penerbitan izin impor sampah plastik.<sup>35</sup> Demikian pula, Malaysia baru-baru ini mengembalikan 42 kontainer sampah plastik yang diimpor secara ilegal ke Inggris, yang berarti ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa

---

<sup>30</sup> IMO, “International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL),” diakses 13 Februari 2024, [https://www.imo.org/en/about/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-\(MARPOL\).aspx](https://www.imo.org/en/about/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx).

<sup>31</sup> Amy L. Brooks, Shunli Wang, dan Jenna R. Jambeck, “The Chinese Import Ban and Its Impact on Global Plastic Waste Trade,” *Science Advances* 4, no. 6 (10 Juni 2018): eaat0131, doi:10.1126/sciadv.aat0131.

<sup>32</sup> Leslie Hook, “Plastic Waste Export Tide Turns to Southeast Asia After China Ban,” *Financial Times*, 13 Juni 2018, <https://www.ft.com/content/94ee72d0-6f26-11e8-852d-d8b934ff5ffa>.

<sup>33</sup> ASEAN Secretariat, “ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy,” 2018.

<sup>34</sup> Colin Staub, “Officials Say Vietnam to End Plastic Imports in 2025,” *Resource Recycling*, 2 April 2019, <https://resource-recycling.com/recycling/2019/04/02/officials-say-vietnam-to-end-plastic-imports-in-2025/>.

<sup>35</sup> Koushan Das, “Vietnam to Restrict Surging Scrap Imports,” *Vietnam Briefing*, 2018, <https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-to-restrict-surg-ing-scrap-imports.html/>.

negara tersebut tidak ingin menjadi tempat pembuangan sampah bagi dunia barat.<sup>36</sup> Perkembangan ini menimbulkan masalah bagi industri daur ulang. Artinya ada kebutuhan untuk koordinasi upaya regional dalam menangani perdagangan sampah plastik.

### **Koordinasi tentang Penggunaan Plastik Sekali Pakai**

Masalah *SUPs* (*Single-Use plastics*) seperti barang-barang plastik yang umum termasuk yaitu kantong plastik, sedotan, pengaduk minuman, sachet, botol sekali pakai termasuk penutupnya, dan lain-lain, adalah isu yang sangat penting, karena konsumsinya yang tinggi menghasilkan limbah dalam jumlah besar setelah masa pakai yang relatif singkat. Diperlukan lebih banyak upaya kebijakan untuk mengatasi masalah barang plastik sekali pakai, termasuk tentang akar penyebab yang menimbulkan budaya dan kebiasaan menggunakan barang sekali pakai. Upaya kebijakan semacam itu dapat menunjukkan dampak positif yang langsung terlihat untuk mengurangi jumlah sampah plastik secara drastis. Sebagai contoh, sebuah studi tentang dampak larangan penggunaan kantong plastik yang diterapkan di California menunjukkan bahwa larangan tersebut mengurangi konsumsi kantong plastik sebesar 71,5%, dan mengeluarkan 100% kantong plastik belanjaan dari tempat daur ulang.<sup>37</sup> Di Eropa, perkiraan menunjukkan bahwa pelarangan dan mengenakan pajak pada kantong plastik sekali pakai di negara-negara Eropa telah memotivasi konsumen untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sampah plastik antara 66 hingga 90 persen.<sup>38</sup> Baru-baru ini, Uni Eropa telah mengadopsi Pedoman Plastik Sekali Pakai sebagai bagian dari Strategi Plastik Uni Eropa,<sup>39</sup> yang bertujuan untuk menghapus plastik sekali pakai tertentu. Sementara itu, negara-negara di Afrika memimpin dalam hal kebijakan kantong plastik dengan lebih dari setengahnya mengadopsi larangan dan pajak. Sebagian besar AMS telah memberlakukan semacam peraturan plastik sekali pakai, terutama yang berkaitan dengan kantong plastik. Namun, tindakan yang lebih koheren di tingkat regional diperlukan, terutama untuk menghindari industri bergerak ke negara-negara yang belum menerapkan peraturan yang lebih ketat tentang penggunaan plastik.

### **Koordinasi tentang Stimulasi Pasar Standar Plastik Berkelanjutan**

Kesenjangan lain di ASEAN yang perlu dikoordinasikan adalah bahwa permintaan daur ulang sampah plastik masih sangat rendah di wilayah AMS. Untuk pengembangan pasar daur ulang plastik, standar kualitas khusus diperlukan untuk memastikan keamanan dan kelayakan plastik daur ulang untuk digunakan sebagai bahan baku. Selain itu, standar untuk membedakan plastik yang dikumpulkan untuk daur ulang dengan yang disortir harus ditetapkan untuk menunjukkan kebersihan dan homogenitasnya. Organisasi Internasional untuk Standardisasi (*International Organization for Standardization/ISO*) telah memimpin inisiatif untuk mengembangkan standar terkait limbah plastik, tetapi standardisasi terpadu di pasar regional ASEAN belum tersedia. Karena alasan ini, diperlukan koordinasi standar pasar yang mengklasifikasikan tingkatan semua jenis limbah plastik yang diakui secara bersama-sama.

Secara global, tahun 2018 ISO membentuk kelompok kerja baru untuk memperbaiki standar Iso 15270 Plastik-Pedoman Pemulihan Dan Daur Ulang Limbah Plastik (*ISO 15270 Plastics-Guidelines for the Recovery and Recycling of Plastic*), dengan tujuan untuk mengeksplorasi kebutuhan akan standar tambahan yang terkait dengan daur ulang plastik, desain untuk daur ulang, dan penggunaan

---

<sup>36</sup> BBC, "Malaysia Returns 42 Containers of 'Illegal' Plastic Waste to UK," 20 Januari 2020, <https://www.bbc.com/news/uk-51176312>.

<sup>37</sup> ASEAN, ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States, 2021, [www.asean.org](http://www.asean.org).

<sup>38</sup> Tobias Dan Nielsen, Karl Holmberg, dan Johannes Stripple, "Need a Bag? A Review of Public Policies on Plastic Carrier Bags - Where, How and to What Effect?," *Waste Management* 87 (Maret 2019): 428–40, doi:10.1016/j.wasman.2019.02.025.

<sup>39</sup> European Commission, "Single Use Plastics," diakses 6 Juni 2024, [https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics\\_en](https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en).

plastik daur ulang.<sup>40</sup> Dalam AMS, standar yang berbeda diterapkan. Misalnya, beberapa produk dalam AMS saat ini memiliki kode SPI (*Society of the Plastics Industry*) atau nomor identifikasi resin tertentu yang dapat menghambat daur ulang. Kode SPI ini digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai jenis plastik misalnya, kode SPI 1 untuk Polietilena Tereftalat dan kode SPI 2 untuk Polietilena Densitas Tinggi dan memandu operasi pemisahan dan daur ulang limbah. Dalam hal pengklasifikasian ini dibutuhkan pengakuan bersama atas standar daur ulang ini.

Standar yang homogen untuk produk dan kemasan plastik di AMS juga masih kurang. Standar produk dan kemasan dapat meningkatkan kualitas produk plastik dan kemampuan daur ulang dengan menghilangkan komponen desain produk yang dapat menjadi penghalang untuk didaur ulang misalnya bahan tambahan kimia, serta menyelaraskan komponen yang menurunkan biaya daur ulang seperti menggunakan bahan yang serupa, dan lainnya. Agar efektif, standar harus diakui dan diadopsi secara luas. Saat ini, ada berbagai standar produk yang berbeda di seluruh AMS yang mencakup penerimaan plastik daur ulang dalam kotak/kemasan makanan, persyaratan pengisi celah produk, bahan tambahan kimia, dan lain-lain.

Penerapan standar untuk kemasan plastik juga bervariasi di seluruh AMS. Di Thailand, Departemen Pengendalian Polusi atau *Pollution Control Department (PCD)* telah menerapkan langkah-langkah pembobotan ringan<sup>41</sup> atau pengurangan berat dengan menghilangkan segel tutup plastik pada botol air minum.<sup>42</sup> Filipina mengizinkan bisnis untuk menggunakan plastik daur ulang dalam kemasan makanan, sementara Malaysia memiliki kriteria ekolabel untuk produk berbasis biomassa. Sedangkan di Singapura, *Circular Materials Lab* Singapura yang terdiri dari lembaga pemerintah *Singapore Economic Development Board* dan perwakilan sektor swasta Food Industry Asia, P&G, Nestle berfokus pada spesifikasi minimum untuk bahan yang dapat terurai secara hayati dan aman untuk makanan. Keberadaan standar produk yang berbeda merupakan penghalang utama untuk mendukung pengembangan pasar daur ulang di ASEAN, jadi ada kebutuhan untuk koordinasi tentang standar yang sama.<sup>43</sup> Pengakuan serentak di AMS juga akan meningkatkan jumlah dan kualitas daur ulang.

Ada juga tantangan yang terkait dengan kemasan yang dapat terurai secara hayati dan kompos. Berbagai produk dan kemasan plastik yang tersedia di pasar ASEAN diberi label biodegradable yang artinya dapat terurai secara hayati, tetapi sebagian besar hanya dapat terurai dalam kondisi laboratorium tertentu, yang mungkin tidak selalu dapat direplikasi di lingkungan alam. Demikian pula, kemasan plastik yang diberi label *compostable* atau “dapat dikomposkan” mungkin tidak cocok untuk pengomposan dan dapat mencemari produk kompos akhir atau pabrik pengomposan. Kurangnya pemahaman yang jelas tentang label atau standar ini menciptakan kebingungan bagi konsumen dan operator limbah tentang cara memilah dan mendaur ulang produk berlabel dengan benar, yang menyebabkan lebih banyak sampah plastik yang tidak didaur ulang dan mungkin kebocoran ke lingkungan. Produsen harus memberikan informasi yang jelas dan kesadaran konsumen untuk mendukung pilihan produk yang berkelanjutan. Di Malaysia, terdapat kebijakan yang bertujuan untuk merevisi kriteria pelabelan ramah lingkungan untuk bahan kemasan plastik yang dapat terurai secara hayati dan dapat dikomposkan sebagai bagian dari “Peta Jalan Malaysia Menuju Nol Plastik Sekali Pakai (*Malaysia’s Roadmap towards Zero Single-use Plastics*) 2018-2030”.<sup>44</sup> Ada kebutuhan untuk

---

<sup>40</sup> European Union and ASEAN Secretariat, “Circular Economy and Plastics: A Gap Analysis in ASEAN Member States” (Mission of the European Union to ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, 2019), <https://www.iges.or.jp/en/pub/ce-plastics/en>.

<sup>41</sup> Pratch Rujivanarom, “Bottled Water Makers Welcome Cap Seal Ban,” *The Nation’s*, 2018, <https://www.nationthailand.com/in-focus/30342183>.

<sup>42</sup> Thai Beverage, “Eco Friendly Packaging,” *ThaiBev*, diakses 11 Juni 2024, [https://sustainability.thaibev.com/2023/en/packaging\\_circular\\_economy.php](https://sustainability.thaibev.com/2023/en/packaging_circular_economy.php).

<sup>43</sup> European Union and ASEAN, “Circular Economy and Plastics: A Gap Analysis in ASEAN Member States.”

<sup>44</sup> Pemerintah Malaysia, “Malaysia’s Roadmap Towards Zero Single-Use Plastics 2018-2030,” diakses 12 Juni 2024, <https://www.malaysia.gov.my/portal/content/30918>.

mengoordinasikan tindakan semacam itu di tingkat regional untuk meningkatkan kualitas daur ulang, terutama mengingat perdagangan yang ada dengan kemasan plastik, produk plastik, dan sampah plastik di seluruh AMS.

## **2. Koordinasi Berbagai Pengetahuan, Upaya Penelitian, dan Kapasitas**

Kesenjangan pengetahuan tentang sumber polusi plastik di lautan ASEAN merupakan tantangan serius. Sumber-sumber di laut menyumbang seperlima sampah dan secara langsung berdampak pada sektor-sektor seperti industri perikanan.<sup>45</sup> Ditambah lagi masalah lain yang muncul adalah mikro plastik, partikel yang berukuran kurang dari 5 mm yang semakin banyak ditemukan dalam sampel lingkungan dan makhluk hidup. Partikel ini dapat dengan sengaja ditambahkan ke dalam kosmetik, deterjen, dan produk lainnya, atau dihasilkan selama penggunaan, produksi, atau pasokan produk.<sup>46</sup> Studi menunjukkan bahwa manusia mengonsumsi mikro plastik ini dalam jumlah besar melalui makanan, seperti makanan laut, dan risiko kesehatan dapat terjadi.<sup>47</sup> Dampak potensial dari mikro plastik masih dalam penyelidikan dan diperlukan lebih banyak upaya penelitian untuk memahami masalah ini sepenuhnya.

Pemahaman tentang mikro plastik, kebocoran di darat dan laut terhadap tantangan sampah laut secara keseluruhan di ASEAN masih terbatas.<sup>48</sup> Studi memberikan dasar bukti dan masukan untuk pengambilan keputusan tentang barang-barang plastik prioritas dan meluncurkan kebijakan potensial untuk mengatasinya. Diperlukan peningkatan pengetahuan dalam mengukur dan memantau sampah plastik di laut, serta penelitian global untuk memahami sumber dan dampak mikro plastik.

Kapasitas penelitian di beberapa AMS masih terbatas dan upaya penelitian tidak terkoordinasi di tingkat ASEAN sehingga menghambat pertukaran pengetahuan dan menyebabkan potensi duplikasi. Contoh inisiatif yang mempromosikan kolaborasi penelitian dan inovasi di seluruh AMS, yaitu Institut Ilmu Kelautan Tropis Singapura (*Tropical Marine Science Institute based in Singapore*), Pusat Pengetahuan Regional untuk Sampah Plastik Laut ERIA, dan RC3S Indonesia.<sup>49</sup> Ada pula inisiatif The Incubation Network, sebuah platform dari Circulate Initiative dan Second Muse yang meluncurkan *Plastic Data Challenge* pada tahun 2019 bertujuan untuk mengakhiri polusi plastik di Asia Selatan dan Asia Tenggara.<sup>50</sup> Inisiatif-inisiatif ini dapat membantu memperkuat berbagi informasi tentang inovasi yang dapat dilakukan di regional ASEAN. Ada kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan kerja sama penelitian dan pengetahuan regional jaringan dan basis data untuk berbagi informasi dan solusi terkait sampah laut, dan untuk menutup kesenjangan koordinasi antara lembaga penelitian dan inisiatif inovasi yang telah ditetapkan dalam AMS.

Di sisi lain, AMS juga menghadapi kesenjangan kapasitas dalam pengelolaan sampah plastik yang mempengaruhi sektor publik dan swasta. Di tingkat pemerintah, pejabat daerah sering kali tidak memiliki informasi dasar tentang isu-isu utama seperti teknologi alternatif untuk memanfaatkan sampah.<sup>51</sup> Demikian pula, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

---

<sup>45</sup> McKinsey Center for Business and Environment dan Ocean Conservancy, “Stemming the Tide: Land Based Strategies for a Plastic Free Ocean,” 2015, <https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2019/04/eae10551-eae10551-full-report-stemming-the.pdf>.

<sup>46</sup> Sarah Gibbens, “You Eat Thousands of Bits of Plastic Every Year,” *National Geographic*, 6 Juni 2019, <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/you-eat-thousands-of-bits-of-plastic-every-year>.

<sup>47</sup> Guanglong Chen, Qingyuan Feng, dan Jun Wang, “Mini Review of Microplastics in The Atmosphere and Their Risks to Humans,” *Science of The Total Environment* 703 (Februari 2020): 135504, doi:10.1016/j.scitotenv.2019.135504.

<sup>48</sup> European Union and ASEAN, “Circular Economy and Plastics: A Gap Analysis in ASEAN Member States.”

<sup>49</sup> Youna Lyons dkk., “A Review of Research on Marine Plastics in Southeast Asia: Who Does What?,” 2019, <https://www.gov.uk/government/publications/a-review-of-research-on-marine-plastics-in-sea-who-does-what>.

<sup>50</sup> The Incubation Network, “Plastics Data Challenge 2020,” 2020, <https://www.incubationnetwork.com/programs/plastics-data-challenge-2020/>.

<sup>51</sup> ASEAN, *ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy*.

berjuang untuk mematuhi peraturan dan mengadopsi pendekatan ekonomi sirkular.<sup>52</sup> Misalnya, berdasarkan skor “UKM Penghijauan” atau *Greening SMEs* dari Small and Medium-Sized Enterprise (SME) 2018 Policy Index, sebagian besar AMS tidak memiliki kebijakan dan program lingkungan yang ditargetkan misalnya insentif dan program pelatihan untuk UKM.<sup>53</sup> Sektor pengelolaan sampah informal, terutama perempuan, yang biasanya merupakan bagian dari kelompok sosial yang paling terpinggirkan dan rentan, turut mengalami kekurangan kapasitas.

Beberapa program pelatihan yang sedang berlangsung di AMS untuk pengembangan kapasitas yaitu pemantauan, penegakan hukum, integrasi sektor persampahan informal ke dalam sistem formal, dan skema EPR yang potensial.<sup>54</sup> Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (*Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/UNESCAP*) memimpin program-program untuk menangani sampah plastik, termasuk inisiatif Closing the Loop. Program-program ini berfokus pada profesionalisasi sektor informal dalam pengelolaan sampah, inovasi, dan teknologi pintar. Di Thailand, JICA Jepang (*Japan International Cooperation Agency*) dan Universitas Chulalongkorn melakukan pengembangan kapasitas tentang kebocoran, prosedur pemantauan, dan dampak lingkungan laut. Program pelatihan tingkat regional seperti Proyek Kerja Sama ASEAN-Norwegia tentang Peningkatan Kapasitas Lokal untuk Mengurangi Polusi Plastik di Wilayah ASEAN (*Regional-level training programs include the ASEAN-Norway Cooperation Project on Local Capacity Building for Reducing Plastic Pollution in the ASEAN Region/ASEANO*) juga sedang dilaksanakan. Akan tetapi program pelatihan peningkatan kapasitas AMS semua ini membutuhkan koordinasi lebih lanjut untuk para pejabat, petugas pengelolaan sampah, UKM, dan UMKM.

### 3. Koordinasi Meningkatkan Kesadaran Publik

Negara-negara ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peningkatan konsumsi. Upaya di tingkat nasional sedang dilakukan untuk mengedukasi konsumen dan bisnis mengenai daur ulang dan pemilahan sampah. Namun, pembelajaran di tingkat regional perlu dibagikan untuk mengurangi biaya desain dan menciptakan kampanye yang efektif. Perubahan sistem dan keterlibatan sektor swasta juga diperlukan untuk memastikan akses ke alternatif yang lebih disukai dan berdampak pada perilaku konsumen.

Upaya tingkat nasional yang bisa dilihat di AMS di antaranya adalah kampanye untuk mengedukasi konsumen dan pelaku usaha tentang daur ulang dan pemilahan sampah, pengembangan materi edukasi terkait, dan pembersihan pantai. Di Brunei Darussalam, inisiatif “Tanpa Kantong Plastik Setiap Hari” atau *No Plastic Bag Everyday* telah meningkatkan kesadaran masyarakat yang tercermin dari kebiasaan menggunakan tas yang dapat digunakan kembali. Di Indonesia telah mengembangkan strategi perubahan perilaku untuk mengatasi polusi plastik. Zero Waste SG dari Singapura<sup>55</sup> dan BambooLao dari Laos telah meluncurkan kampanye untuk pariwisata ramah lingkungan dan sedotan bambu.<sup>56</sup> Selain itu, Filipina menutup tujuan liburan paling terkenal, pulau Boracay, untuk melakukan pembersihan besar-besaran.<sup>57</sup> Program-program kesadaran, pendidikan, dan penjangkauan publik yang

---

<sup>52</sup> OECD, *SME Policy Index: ASEAN 2018*, SME Policy Index (OECD, 2018), [https://www.oecd-ilibrary.org/development/sme-policy-index-asean-2018\\_9789264305328-en](https://www.oecd-ilibrary.org/development/sme-policy-index-asean-2018_9789264305328-en).

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> ASEAN, *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States*.

<sup>55</sup> Zero Waste SG, “Programs of Zero Waste SG,” 2020, <https://www.zerowastesg.com/>.

<sup>56</sup> World Bank, “Meet the Innovators Battling Plastic Waste in Laos: Arounothay Khoungkhakoune,” 31 Mei 2019, <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/05/31/meet-the-innovators-battling-plastic-waste-in-laos-arounothay-khoungkhakoune>.

<sup>57</sup> Gulf News, “Philippines: Boracay Island Shuts Down for 6 Months as Clean-Up Begins,” 26 April 2018, <https://gulfnews.com/world/asia/philippines/philippines-boracay-island-shuts-down-for-6-months-as-clean-up-begins-1.2212000>.

ada saat ini dapat memberikan pelajaran dan pengalaman berharga untuk menyusun program-program di masa depan. Ada kebutuhan untuk berbagi dan mengkonsolidasikan pelajaran-pelajaran ini di tingkat regional untuk meningkatkan pengalaman kolektif AMS.

Tantangan kedua yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat adalah banyaknya variasi produk dan kemasan dengan label akhir masa pakai menyulitkan konsumen untuk memilih pembelian yang berkelanjutan. Label sering kali tumpang tindih dengan label lainnya, sehingga membingungkan dan sulit bagi konsumen untuk membedakan dan menafsirkannya. Kurangnya transparansi dan kejelasan tentang label juga berkontribusi terhadap *greenwashing*. Sebagai contoh, label yang saat ini digunakan pada plastik yang dapat terurai menyatakan bahwa plastik tersebut ramah lingkungan. Namun, beberapa negara telah melarang penggunaan plastik yang dapat terurai, misalnya kantong plastik, karena adanya literatur tentang dampak negatifnya terhadap lingkungan. Karena banyak perusahaan memiliki pasar yang sama di seluruh AMS, menjual berbagai macam merek dan produk, ada kebutuhan untuk menyederhanakan pemahaman tentang pelabelan di AMS dan memfasilitasi pengakuan yang luas pelabelan akhir masa pakai untuk produk plastik. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan pemilahan sampah yang tepat, menurunkan risiko kontaminasi, dan meningkatkan tingkat daur ulang.

Terakhir, kebutuhan koordinasi di kawasan ASEAN tentang produsen yang kurang bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan oleh produk mereka. *Extended Producer Responsibility (EPR)* adalah pendekatan kebijakan yang mengharuskan produsen untuk mengolah atau membuang produk pasca-konsumen. EPR telah diterapkan selama lebih dari 20 tahun di 60 negara, termasuk sepuluh AMS. Negara-negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan inisiatif EPR, seperti peta jalan EPR Indonesia, Peta Jalan Ekonomi Sirkular Malaysia, kerangka kerja pelaporan kemasan wajib Singapura, dan Organisasi Daur Ulang Kemasan Vietnam. Berbagi praktik terbaik, prinsip-prinsip desain, dan pengalaman dapat membantu mengembangkan EPR yang berkelanjutan karena semakin banyak AMS yang mempertimbangkan kebijakan ini.

#### **4. Koordinasi Kemitraan Pemangku Kepentingan**

Menarik investasi sangat penting untuk merealisasikan berbagai proyek inovatif, mulai dari proyek infrastruktur besar untuk pengumpulan dan daur ulang plastik secara terpisah hingga perusahaan rintisan kecil untuk produksi dan pemasaran produk inovatif yang menggantikan plastik sekali pakai. Namun, para inovator terutama UKM dan UMKM, masih menghadapi tantangan dalam menemukan investasi untuk meningkatkan skala. Terlepas dari adanya kemitraan multi-pemangku kepentingan nasional seperti Development Bank of the Philippines dan Thailand PPP Plastics, terdapat kesenjangan dalam mengoordinasikan kemitraan ini di tingkat regional. Kemitraan ini sangat penting untuk mengatasi masalah plastik laut, tetapi ASEAN menghadapi tantangan seperti kurangnya saluran yang tepat untuk menghubungkan investor dengan pengusaha, kurangnya jalur proyek, dan pengembalian investasi yang tidak memadai. Mengoordinasikan kemitraan ini di tingkat regional sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek-proyek pengelolaan plastik.

#### **Kesimpulan**

Penelitian menggunakan pendekatan *dilemmas of commons aversion* ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN melihat situasi sampah laut merupakan permasalahan yang mendesak, tetapi tidak aturan yang mengikat untuk mengatasi hal tersebut sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih efektif. Dapat dikatakan bahwa kerja sama ASEAN menjelaskan bahwa terbentuknya kerja sama internasional terjadi karena adanya kekhawatiran bersama yang akan dialami oleh semua pihak jika tidak ada tindakan kolektif yang diambil. Dengan hadirnya aturan yang mengikat satu sama lain, setiap negara yang berkoordinasi dapat mewujudkan dampak yang inklusif karena tindakan individu tidak

cukup untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan berskala besar terutama di tingkat regional ASEAN.

Meskipun perkembangan implementasi *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* ini tidak diterangkan secara terbuka oleh negara-negara anggota ASEAN, kehadiran RAP ASEAN ini telah melahirkan rezim regional yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai prinsip dan norma utama untuk menyelesaikan masalah lingkungan laut. Dengan demikian, *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* adalah contoh bagaimana negara-negara dapat mengatasi *dilemmas of common aversion* dengan bekerja sama untuk menghindari dampak negatif yang lebih parah dari polusi sampah laut, sambil memastikan bahwa manfaat dari kerja sama tersebut dirasakan oleh semua anggota. Rencana aksi ini bukan hanya penting untuk mengelola sampah laut, tetapi juga untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama regional dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks dan mendesak.

## Referensi

- ASEAN. *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States*. Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2021. [www.asean.org](http://www.asean.org).
- . *ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy*. Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2018. <https://asean.org/book/asean-sustainable-urbanisation-strategy/>.
- BBC. “Malaysia Returns 42 Containers of ‘Illegal’ Plastic Waste to UK,” 20 Januari 2020. <https://www.bbc.com/news/uk-51176312>.
- Bowen, Glenn A. “Document Analysis as a Qualitative Research Method.” *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (3 Agustus 2009): 27–40. doi:10.3316/QRJ0902027.
- Brooks, Amy L., Shunli Wang, dan Jenna R. Jambeck. “The Chinese Import Ban and Its Impact on Global Plastic Waste Trade.” *Science Advances* 4, no. 6 (10 Juni 2018): eaat0131. doi:10.1126/sciadv.aat0131.
- Chen, Guanglong, Qingyuan Feng, dan Jun Wang. “Mini Review of Microplastics in The Atmosphere and Their Risks to Humans.” *Science of The Total Environment* 703 (Februari 2020): 135504. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.135504.
- Colin Staub. “Officials Say Vietnam to End Plastic Imports in 2025.” *Resource Recycling*, 2 April 2019. <https://resource-recycling.com/recycling/2019/04/02/officials-say-vietnam-to-end-plastic-imports-in-2025/>.
- Direktorat KSBA Kemlu RI. “Analisis Pembentukan ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris Tahun 2021.” Wawancara oleh Effa Ellin Sinaga. *Zoom Meeting*, 6 Juni 2024.
- Ellen MacArthur Foundation. “The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics,” 2016. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics>.
- European Commission. “Single Use Plastics.” Diakses 6 Juni 2024. [https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics\\_en](https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en).
- European Union and ASEAN. “Circular Economy and Plastics: A Gap Analysis in ASEAN Member States.” Mission of the European Union to ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, 2019. <https://www.iges.or.jp/en/pub/ce-plastics/en>.
- Gulf News. “Philippines: Boracay Island Shuts Down for 6 Months as Clean-Up Begins,” 26 April 2018. <https://gulfnews.com/world/asia/philippines/philippines-boracay-island-shuts-down-for-6-months-as-clean-up-begins-1.2212000>.
- IMO. “International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL).” Diakses 13 Februari 2024. [https://www.imo.org/en/about/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-\(MARPOL\).aspx](https://www.imo.org/en/about/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx).
- IUCN. “Plastic Pollution,” 2021. <https://www.iucn.org/resources/issues-brief/marine-plastic-pollution>.

- Jambeck, Jenna R., Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, dan Kara Lavender Law. "Plastic Waste Inputs From Land into the Ocean." *Science* 347, no. 6223 (13 Februari 2015): 768–71. doi:10.1126/science.1260352.
- Julie Raynaud. *Valuing Plastic: The Business Case for Measuring, Managing and Disclosing Plastic Use in The Consumer Goods Industry*, 2014. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/9238>.
- Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. "Indonesia's Plan of Action on Marine Plastic Debris 2017-2025," 2018. [/https://maritim.go.id/konten/unggah/2018/03/NAP\\_Marine\\_Plastic\\_Debris\\_Indonesia\\_Summary.pdf](https://maritim.go.id/konten/unggah/2018/03/NAP_Marine_Plastic_Debris_Indonesia_Summary.pdf).
- Koushan Das. "Vietnam to Restrict Surging Scrap Imports." *Vietnam Briefing*, 2018. <https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-to-restrict-surging-scrap-imports.html/>.
- Leslie Hook. "Plastic Waste Export Tide Turns to Southeast Asia After China Ban." *Financial Times*, 13 Juni 2018. <https://www.ft.com/content/94ee72d0-6f26-11e8-852d-d8b934ff5ffa>.
- Lyons, Youna, Theresa Linting Su, Mei Lin Neo, Authors Mei Lin Neo, Jade Chung, Karen Raubenheimer, dan Sam Shu Qin. "A Review of Research on Marine Plastics in Southeast Asia: Who Does What?," 2019. <https://www.gov.uk/government/publications/a-review-of-research-on-marine-plastics-in-sea-who-does-what>.
- McKinsey Center for Business and Environment, dan Ocean Conservancy. "Stemming the Tide: Land Based Strategies for a Plastic Free Ocean," 2015. <https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2019/04/ea10551-eae10551-full-report-stemming-the.pdf>.
- Nielsen, Tobias Dan, Karl Holmberg, dan Johannes Stripple. "Need a Bag? A Review of Public Policies on Plastic Carrier Bags - Where, How and to What Effect?" *Waste Management* 87 (Maret 2019): 428–40. doi:10.1016/j.wasman.2019.02.025.
- OECD. "Extended Producer Responsibility." OECD, 20 September 2016. doi:10.1787/9789264256385-en.
- . *SME Policy Index: ASEAN 2018*. SME Policy Index. OECD, 2018. [https://www.oecd-ilibrary.org/development/sme-policy-index-asean-2018\\_9789264305328-en](https://www.oecd-ilibrary.org/development/sme-policy-index-asean-2018_9789264305328-en).
- Pemerintah Malaysia. "Malaysia's Roadmap Towards Zero Single-Use Plastics 2018-2030." Diakses 12 Juni 2024. <https://www.malaysia.gov.my/portal/content/30918>.
- Pratch Rujivanarom. "Bottled Water Makers Welcome Cap Seal Ban." *The Nation's*, 2018. <https://www.nationthailand.com/in-focus/30342183>.
- Rajeev Kumar Singh, Dickella Gamaralalage Jagath Premakumara, Ran Yagasa, dan Kazunobu Onogawa. "State of Waste Management in Phnom Penh, Cambodia," 10 Juli 2018. <https://www.unep.org/ietc/resources/report/state-waste-management-phnom-penh-cambodia>.
- Sarah Gibbens. "You Eat Thousands of Bits of Plastic Every Year." *National Geographic*, 6 Juni 2019. <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/you-eat-thousands-of-bits-of-plastic-every-year>.
- Temasek, dan AlphaBeta. "Better Together: Business, Government, Society and Our Sustainable Future," 2018. <https://www.ecosperity.sg/en/ideas/better-together-business-government-society-and-our-sustainable-future.html>.
- Thai Beverage. "Eco Friendly Packaging." *ThaiBev*. Diakses 11 Juni 2024. [https://sustainability.thaibev.com/2023/en/packaging\\_circular\\_economy.php](https://sustainability.thaibev.com/2023/en/packaging_circular_economy.php).
- The Incubation Network. "Plastics Data Challenge 2020," 2020. <https://www.incubationnetwork.com/programs/plastics-data-challenge-2020/>.
- UNDP Indonesia. "UNDP, Bappenas and Denmark Collaborate to Support the Development of Circular Economy in Indonesia," 3 Maret 2020. <https://www.undp.org/indonesia/press-releases/undp-bappenas-and-denmark-collaborate-support-development-circular-economy-indonesia>.

- UNEP. “From Pollution to Solution a Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution,” 2021. <https://www.unep.org/resources/pollution-solution-global-assessment-marine-litter-and-plastic-pollution>.
- . “Phnom Penh Waste Management Strategy and Action Plan 2018-2035,” 2018. <https://www.unep.org/ietc/resources/policy-and-strategy/phnom-penh-waste-management-strategy-and-action-plan-2018-2035>.
- . “Summary Report: Waste Management in ASEAN Countries,” 21 Februari 2017. <https://www.unep.org/resources/report/waste-management-asean-countries-summary-report>.
- United Nations. “From Waste Reduction Toward Circular Economy Implementation in Indonesia,” 2018. [https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-10/Laksmi%20Dhewanthi%20%28Indonesia%29%20CE%20in%20Indonesia\\_Laksmi\\_02102018.pdf](https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-10/Laksmi%20Dhewanthi%20%28Indonesia%29%20CE%20in%20Indonesia_Laksmi_02102018.pdf).
- . “New UN Report Finds Marine Debris is Harming More Than 800 Species, Costing Countries Millions,” 2016. <https://news.un.org/en/story/2016/12/547032>.
- . “Overview on the 3R Practices at Waste Management in Myanmar,” 2019. [https://unrcd.un.org/sites/unrcd.un.org//files/8th-3r\\_cbg-2\\_myanmar.pdf](https://unrcd.un.org/sites/unrcd.un.org//files/8th-3r_cbg-2_myanmar.pdf).
- . “The UN Ocean Conference 5-9 June, 2017.” Diakses 23 Februari 2024. <https://www.un.org/en/conf/ocean/>.
- World Bank. “Indonesia Marine Debris Hotspot,” 2018. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/983771527663689822/pdf/Indonesia-Marine-debris-hotspot-rapid-assessment-synthesis-report.pdf>.
- . “Meet the Innovators Battling Plastic Waste in Laos: Arounthay Khounghakoune,” 31 Mei 2019. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/05/31/meet-the-innovators-battling-plastic-waste-in-laos-arounthay-khounghakoune>.
- Zero Waste SG. “Programs of Zero Waste SG,” 2020. <https://www.zerowastesg.com/>.